

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS WILAYAH STUDI

4.1 Gambaran Umum Wilayah Studi

4.1.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Propinsi Riau terdiri atas 8 Kecamatan dan 49 kelurahan dengan luas wilayahnya adalah 632.26 Km². Secara fisik terbelah dua oleh Sungai Siak yaitu bagian utara dan bagian selatan.

a. Letak dan Batas Daerah Administrasi

Terletak pada 101°14 – 101°34 BT dan 0°25 – 0°45 LS dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Siak dan Kab. Kampar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Kampar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kab. Siak dan Kab. Kampar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Kampar

b. Topografi dan Kemiringan Lahan

Sebagian besar merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 5 m dpl. Daerah perbukitan terdapat pada daerah-daerah tertentu di bagian utara dan timur kota. Kemiringan lereng sebagian besar 0 – 2 % kecuali daerah tertentu di bagian utara dan timur yang > 15 %.

c. Hidrologi

Hidrologi Pekanbaru ditandai dengan Sungai Siak yang membelah kota Pekanbaru. Sungai-Sungai kecil yang bermuara padanya berfungsi untuk drainase kota yaitu Sungai Sago, Sungai Limau, Sungai Senapelan, dan Sungai Sail. Sementara Sungai Siak berfungsi sebagai prasarana transportasi air dan penyedia sumber air baku untuk air minum dan kebutuhan lainnya.

d. Penyebaran Wilayah

Penyebaran wilayah Kota Pekanbaru belum tertata dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh konsentrasi permukiman dan pusat kota di bagian selatan Sungai Siak, yang merupakan historis Kota Pekanbaru, namun potensi untuk menata wilayah masih sangat memungkinkan karena tersedianya lahan yang luas.

e. Tata Ruang Kota

Menurut Rencana Tata Ruang Kota (RUTR Kodya Pekanbaru 2015), alokasi pemanfaatan ruang dibedakan menjadi 2 yaitu : Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

Kawasan Lindung dengan luas 16.768 Ha meliputi :

1. Areal Sungai di Kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan Rumbai
2. Daerah dengan kemiringan tanah >40%
3. Daerah tepi Sungai
4. Kawasan sepanjang perbatasan kota
5. Sepanjang jalur patahan di Barat Daya kota (Kecamatan Tampan)
6. Daerah rawa dan gambut di Kecamatan Rumbai dan Tampan.

Kawasan budidaya seluas 46.458 Ha meliputi :

- Kawasan budidaya non perkotaan : pertanian, hutan kota, dan tanah kota
- Kawasan budidaya Perkotaan yang akan merupakan daerah terbangun meliputi: perumahan, perdagangan, perkantoran, kompleks militer, prasarana dan sarana kota.

f. Perumahan dan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan hal yang sangat kompleks dalam konteks tata kota karena berhubungan dengan orang-orang yang tinggal didalamnya. Pemenuhan akan perumahan dan permukiman dapat dilakukan melalui 2 proses yaitu :

1. Proses densifikasi atau proses pemenuhan kebutuhan perumahan yang dilakukan di daerah yang sudah terbangun, proses ini akan menjadikan suatu lingkungan permukiman bertambah padat. Model ini terdapat di pusat-pusat kegiatan komersial/perdagangan yang sudah berkembang

yaitu di Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Sail, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Sukajadi.

2. Proses ekstensifikasi atau proses pemenuhan kebutuhan perumahan melalui pengembangan kawasan perumahan baru yang sebelumnya masih kosong. Dalam hal ini daerah pengembangan ke arah Barat Daya dan barat yaitu di Kecamatan Tampan serta arah utara yaitu utara Sungai Siak (Kecamatan Rumbai, dan Bukit Raya).

4.1. 2 Perkembangan Kegiatan Ekonomi

Pekanbaru adalah pusat pemerintah daerah Riau dengan jumlah penduduk pada tahun 2000 sebanyak 597.230 jiwa. Kota Pekanbaru terdiri dari delapan Kecamatan. Akhir-akhir ini Pekanbaru sedang giat-giatnya melakukan pembangunan disegala bidang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan ini dapat ditingkatkan apabila ditunjang dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dan penyediaan sarana dan prasarana. Apabila terjadi peningkatan pendapatan dalam masyarakat dari waktu ke waktu, maka terjadi pertumbuhan ekonomi.

Struktur perekonomian Kota Pekanbaru memperlihatkan bahwa sektor basis yang menjadi andalan adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor bank dan lembaga keuangan lainnya. Sektor ini memperlihatkan peningkatan yang cukup besar.

Peningkatan kegiatan sektor andalan tersebut memberi dampak pada meningkatnya permintaan ruang dan terjadinya alih peruntukan ruang. Sebagai contoh peningkatan kegiatan perdagangan akan meningkatkan inventaris kawasan perdagangan ke kawasan non perdagangan.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang pertumbuhan ekonomi Pekanbaru pada tahun 2000, maka pada Tabel 4.1 disajikan tentang pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor usaha, baik dari segi harga yang berlaku maupun dari segi harga konstan. Tingkat pertumbuhan ekonomi Pekanbaru cukup tinggi, yakni sebesar 16,51 persen, ini jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Riau yang hanya sebesar 10,25 persen. Pertumbuhan yang tinggi terjadi pada sektor keuangan dan asuransi. Ini menunjukkan bahwa sektor

keuangan mulai membaik, apalagi dengan adanya merger dari beberapa bank yang membuat kepercayaan masyarakat mulai pulih kembali terhadap perbankan.

Dari segi kontribusi terhadap PDRB Pekanbaru ternyata sektor keuangan dan asuransi memberikan kontribusi terbesar yaitu 27,90 persen dari PDRB. Kemudian diikuti oleh perdagangan, Jasa, dan lain sebagainya. Sektor industri terlihat kontribusinya kecil jika dibandingkan dengan Riau, ini disebabkan kawasan industri pada umumnya terdapat pada daerah pinggiran (luar kota) sementara administrasi (perkantorannya) terdapat di kota pekanbaru.

Tabel 4.1 Perbandingan Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Pekanbaru dan Riau Tahun 2000

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan		Distribusi	
	PDRB Pekanbaru	PDRB Riau	PDRB Pekanbaru	PDRB Riau
1. Pertanian	5,15	9,14	1,35	23,40
2. Pertambangan	5,35	7,42	0,05	2,48
3. Industri Pengolahan	5,86	12,46	6,00	25,74
4. Listrik, Air & Gas	4,80	4,66	1,90	0,88
5. Bangunan & Kontruksi	9,13	6,20	11,59	5,58
6. Perdagangan, Hotel & RM	8,21	4,94	23,93	18,66
7. Angkutan & Komunikasi	8,77	6,56	12,02	6,41
8. Keuangan & Asuransi	70,57	34,01	27,90	7,68
9. Jasa	5,16	2,79	15,26	9,17
PDRB	16,51	10,25	100,00	100,00

Sumber: BPS, Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2000

Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi di Pekanbaru tahun 2000, juga ditunjukkan oleh meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat Pekanbaru dari waktu ke waktu. Dari Tabel 4.2 terlihat pendapatan per kapita pada tahun 1996 sebesar Rp 2.340.513,06 meningkat menjadi Rp 5.093.714,30 pada tahun 2000. Begitu juga PDRB per kapita. Dari sisi harga konstan ternyata PDRB per kapita selama periode tersebut menunjukkan fluktuasi, dimana

periode 1996 – 2000 terjadi peningkatan, tetapi pada tahun 1998 terjadi penurunan. Begitu juga dari sisi pendapatan per kapita.

Terjadi peningkatan selama periode 1996-1997 disebabkan karena pada saat itu kondisi ekonomi Indonesia mulai membaik, tetapi pada pertengahan tahun 1997 terjadi krisis ekonomi, maka terjadi penurunan pendapatan riil masyarakat. Ini ditunjukkan dengan menurunnya pendapatan per kapita. Namun pada tahun 2000 kondisi ekonomi nasional mulai membaik, dan ini memberikan dampak juga terhadap perekonomian kota Pekanbaru. Sehingga pada tahun 2000 pendapatan per kapita maupun PDRB per kapita mulai meningkat kembali.

Tabel 4.2 PDRB Per Kapita dan Pendapatan Regional Per Kapita Tahun 1996–2000

Tahun	PDRB Per Kapita	Pendapatan Per Kapita
A. Atas Harga Berlaku		
1996	2.521.390,89	2.340.513,06
1997	2.913.722,50	2.704.763,33
1998	3.586.397,28	3.328.436,19
1999	3.901.406,11	3.413.040,10
2000	5.487.122,16	5.093.714,30
B. Atas Harga Konstan 1993		
1996	2.102.307,26	1.951.571,82
1997	2.290.659,71	2.126.416,40
1998	2.147.844,61	1.993.844,15
1999	2.017.901,74	1.873.218,09
2000	2.259.366,55	2.093.377,71

Sumber: BPS, Pekanbaru Dalam Angka 2000

4.1.3 Kondisi Sosial Ekonomi Daerah Penelitian

4.1.3.1 Kawasan Limbungan/Teluk Leok

1. Letak Lokasi dan Luas Kawasan.

Kawasan Limbungan merupakan bagian dari Kelurahan Limbungan dan terletak pada posisi utara Sungai Siak.

2. Kondisi Topografi.

Kondisi topografi kawasan ini datar dengan kemiringan sangat kecil sehingga sering terendam pada musim hujan.

3. Kepadatan Penduduk.

Kelurahan Limbungan dengan jumlah penduduk menurut data tahun 1997 yang diperoleh dari Kantor Kelurahan saat kunjungan lapangan adalah 13.228 Jiwa. Luas kelurahan adalah 817 Ha. Jadi kepadatan (bruto) adalah 16,19 Jiwa/Ha.

4. Sosial – Ekonomi Penduduk.

Dari data statistik kelurahan menunjukkan bahwa jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ada sebanyak 2.510 KK, dimana 928 (36,97 %) diantaranya merupakan KK Miskin Sejahtera 1 dan Pra Sejahtera. Penduduk yang bermukim disini adalah merupakan penduduk pendatang, dengan sebagian besar sebagai buruh.

5. Sarana dan Prasarana Lingkungan

a. *Jalan Lingkungan dan Jalan Setapak*

Jalan yang ada di kawasan Limbungan relatif baik ditunjukan dengan keadaan jalan yang sudah diperkeras dengan cor beton, akses jalan masuk sudah baik.

b. *Saluran Drainase.*

Dari pengamatan visual dilapangan keadaan drainase dari segi prasarana sudah baik namun saluran pembuangan ke luar kawasan yaitu ke Sungai Siak belum tertangani dengan baik yang mengakibatkan banyak penyumbatan di musim penghujan.

c. *Sarana sanitasi dan Persampahan*

Sanitasi di kawasan Limbungan masih kurang diperhatikan terlihat dari masih banyaknya penduduk membuang tinja di saluran yang tersedia di sepanjang jalan atau membuang tinja di lahan kosong . Pembuangan sampah belum terkoordinir dengan baik. Masyarakat masih menggunakan sistem pembakaran atau dibuang ke sembarang tempat.

d. Sarana Air bersih

Dari pengamatan visual keperluan air diperoleh dari 2 sumur artesis yang dibangun dengan bantuan perusahaan swasta, Sumur yang ada tersebut belum mencukupi karena tidak seimbang dengan jumlah warga yang ada.

4.1.3.2 Kawasan Kampung Baru

1. Letak Lokasi dan Luas Kawasan

Kawasan Kampung baru merupakan bagian dari Kel. Kampung Baru dan terletak pada sisi Selatan Sungai Siak.

2. Kondisi Topografi

Kondisi topografis kawasan ini adalah datar dengan kemiringan sangat kecil sehingga wilayah ini sering terendam pada musim hujan.

3. Kepadatan Penduduk

Kelurahan Kampung baru dengan jumlah penduduk menurut data tahun 1997 yang diperoleh dari Kantor Kelurahan saat kunjungan lapangan adalah 6.639 Jiwa. Luas kelurahan adalah 119 Ha, Jadi kepadatan (bruto) adalah 55,78 Jiwa/Ha.

4. Sosial – Ekonomi Penduduk

Dari Data statistik kelurahan menunjuk bahwa jumlah KK yang ada 320 KK diantaranya merupakan KK miskin atau termasuk ke KK sejahtera 1 dan pra sejahtera.

5. Sarana dan Prasarana Lingkungan

a. Jalan Lingkungan dan Jalan Setapak

Kondisi jalan di lingkungan Kampung Baru relatif baik hanya ditemui permasalahan pada tikungan-tikungan jalan yang bergelombang dengan sudut putaran yang kecil sehingga sering terjadi kecelakaan.

b. Saluran Drainase.

Walaupun drainase di sepanjang jalan sebagian besar sudah tersedia, namun lokasi yang rendah ke pembuangan mengakibatkan lokasi ini sangat rawan genangan.

c. *Sanitasi dan Sarana Persampahan*

Sarana sanitasi di permukiman masih belum merata di setiap perumahan mengakibatkan sanitasi lingkungan juga kurang baik, buangan tinja masih dijumpai di saluran-saluran. Sarana sampah berupa TPS sudah tersedia tetapi kurang dimanfaatkan oleh warga setempat. Kesadaran untuk tidak membuang sampah secara sembarangan terlihat masih rendah sehingga sampah berserakan di kawasan ini.

d. *Sarana Air Bersih*

Keperluan air bersih diperoleh dari air sumur, namun kondisi sumur kurang baik karena air berasal dari air payau. Sistem perpipaan belum menjangkau kawasan ini. Sangat diharapkan oleh warga adanya air artesis sehingga biaya operasionalnya bisa terjangkau oleh masyarakat.

4.1.3.3 Kawasan Bandar

1. *Letak Lokasi dan Luas Kawasan*

Kawasan Bandar adalah merupakan bagian dari areal Kelurahan Bandar. Batas kawasan adalah sepanjang Kota Baru, Jalan Perdagangan dan Sungai Siak.

2. *Kondisi Topografi*

Kondisi topografis kawasan ini relatif datar dengan kemiringan sangat kecil sehingga wilayah ini sering terendam pada musim hujan.

3. *Kepadatan Penduduk.*

Kawasan Bandar dengan Luas 20 Ha berpenduduk sekitar 3.500 Jiwa atau kotornya adalah 175 Jiwa/Ha

4. *Sosial – Ekonomi Penduduk*

Dari data statistik kelurahan menunjukkan bahwa jumlah KK yang ada adalah 5440 KK, dimana 564 KK diantaranya merupakan KK Miskin atau termasuk ke Keluarga Sejahtera 1 dan pra sejahtera. Sebagian besar penduduknya berdagang.

5. *Sarana dan Prasarana Lingkungan.*

a. *Jalan Lingkungan dan Jalan Setapak.*

Kondisi jalan lingkungan di Kampung Bandar sebagian besar sudah baik.

b. Saluran Drainase

Arus balik dari Sungai Siak sering memenuhi saluran pembuangan yang ada walaupun saluran drainase untuk pembuangan ke luar kawasan sudah tersedia, namun tidak berfungsi.

c. Sanitasi dan Sarana Persampahan.

Masih dijumpai penduduk yang membuang tinja WC diatas saluran pembuangan. Tempat pembuangan sampah sementara belum ada sehingga warga sering membuang sampah langsung ke saluran drainase. Sebagian Masyarakat masih menggunakan Sungai sebagai MCK.

d. Sarana Air Bersih

Sumur merupakan sumber air bersih, kondisi sumur berada pada tanah yang payau, sehingga kurang memenuhi standar kesehatan. Dalam hal ini sangat diperlukan sumur dalam/artesis bilamana sistem perpipaan belum menjangkau kawasan ini.

e. Rumah Ibadah

Di daerah Kampung Bandar ditemukan rumah ibadah yang berusia ratusan tahun, yaitu masjid raya (Mesjid Sulatan Abdul Jalil Alaudin Syah III dan IV) yang dibangun pada tahun 1769, Mesjid Raya ini sampai saat ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat kegiatan agama islam, disamping itu sebagai objek wisata tempat peninggalan sejarah.

4.1.3.4 Kawasan Kampung Dalam

1. Letak Lokasi dan Luas Kawasan

Kawasan Kampung Dalam merupakan bagian dari kelurahan Kampung Dalam. Batas Kawasannya meliputi Jalan H. Sulaiman, Jl. Kampung Dalam II, Jl. Kampung Dalam, Jl. Sudirman dan Jl. Tanjung Datuk. Lokasi terletak bagian selatan Sungai Siak dekat dengan pelabuhan /dermaga Pekanbaru. Luas Kawasan 14 HA

2. Kondisi Topografi

Kondisi topogtafis kawasan ini adalah datar dengan kemiringan sangat kecil sehingga wilayah ini sering terendam pada musim hujan.

3. **Kepadatan Penduduk**

Kelurahan Kampung Dalam jumlah penduduk menurut data tahun 2000 yang diperoleh dari Kantor Kelurahan saat kunjungan lapangan adalah 3.629 Jiwa. Luas kelurahan adalah 68 HA, jadi kepadatan (bruto) adalah 53 Jiwa/Ha. Dari jumlah penduduk kelurahan tersebut sebagian besar (80 %) tinggal pada kawasan kumuhnya sehingga kepadatan penduduk kawasan kumuh ini adalah sangat tinggi yaitu 5337 jiwa/Ha.

4. **Sosial – Ekonomi Penduduk**

Dari Data statistik kelurahan menunjukkan bahwa jumlah KK yang masuk katagori miskin adalah sebanyak 364 KK (KK Sejahtera 1 dan Pra Sejahtera). Lebih kurang 70 % penduduk bermata pencaharian sebagai pedagang.

5. **Sarana dan Prasarana Lingkungan**

a. *Jalan Lingkungan dan Jalan Setapak*

Kondisi jalan setapak sudah diperkeras dengan aspal ataupun dengan cor beton, namun lebar jalan menjadi permasalahan utama karena sangat sempit dengan pola yang tidak teratur, sedangkan mobilitas penduduk tinggi dan menjadi jalur lintas alternatif menuju kawasan perdagangan. Kondisi seperti ini menyebabkan aksesibilitas ke kawasan ini terhambat disamping membahayakan apabila menghadapi kondisi darurat seperti kebakaran, atau mengevakuasi orang sakit.

b. *Saluran Drainase*

Kondisi drainase di Kawasan Kampung Dalam sangat buruk, kondisi ini diakibatkan kerapatan bangunan yang tinggi dan tata letak yang tidak teratur sehingga drainase yang ada sangat sempit dan pola yang tidak teratur. Dilain pihak tofografi yang sejajar dengan Sungai Siak sehingga limpahan genangan Sungai Siak sangat berpengaruh apabila musim hujan.

c. *Sanitasi dan Sarana Persampahan.*

Terdapatnya septic tank komunal sangat membantu untuk penanggulangan sanitasi lingkungan, namun dengan perbandingan jumlah penduduk yang ada sarana ini sangat kurang jumlahnya. Masih

dijumpai penduduk membuang tinja pada saluran yang tersedia di sepanjang jalan/ gang. Kesadaran penduduk dalam menangani sampah masih sangat rendah, hal ini ditunjukkan oleh berseraknya sampah di saluran drainase, Sungai Sago, dan di pinggiran Sungai Siak. Tempat penampungan sampah di kawasan ini hanya ada dua yaitu di pinggir kantor lurah dan di jalan M. Yatim.

d. Sarana Air Bersih

Air bersih di kawasan ini sebagian dipenuhi oleh sistem perpipaan walaupun masih banyak keluhan dengan sering tersendat-sendat. Kondisi ini ditanggulangi oleh sumur bor, dari visualisasi lapangan terdapat 5 sumur bor yang dibangun dengan bantuan pihak swasta dan swadaya masyarakat. Namun dirasakan masyarakat masih kurang memadai dibanding dengan kebutuhan yang ada.

4.2 Kebijakan dan Arah Perkembangan Wilayah

Dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru tahun 2001-2005 yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dinyatakan visi pembangunan daerah Kota Pekanbaru ke depan sampai tahun 2020 adalah ***terwujudnya kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan pelayan jasa yang handal dan terintegrasi di Asia Tenggara Tahun 2020***. Berikut ini disajikan kutipan kebijakan pembangunan kota Pekanbaru sampai tahun 2020 menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru.

4.2.1 U m u m

Pembangunan Kota Pekanbaru mengupayakan terwujudnya masyarakat madani dengan memprioritaskan pada upaya pemberdayaan masyarakat, penciptaan dan perluasan kesempatan kerja dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sejalan dengan permasalahan yang mendasar di Kota Pekanbaru, maka kebijakasaan umum untuk pembangunan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Penataan kembali ruang kota (space) dalam rangka menciptakan kondisi perkotaan yang sesuai dengan motto kota yaitu "Bertuah ", Bersih, Tertib, Usaha Bersama, Aman dan Harmonis.
- b. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah agar mampu mendukung pelaksanaan pemerintah agar mampu mendukung pelaksanaan pemerintah yang bersih, berwibawa dan bebas KKN, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
- c. Pembangunan prasarana kota sesuai dengan tuntutan perkembangan kota yang modern dan sebagai kota metropolitan.
- d. Penciptaan lapangan kerja baru sejalan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja yang terus berkembang pesat.
- e. Pelaksanaan ekonomi kerakyatan, dengan memobilisasi dan mengefektifkan semua sumberdaya yang ada dalam rangka mengentaskan kemiskinan penduduk Kota Pekanbaru yang masih meliputi 27 %.

4.2.2 Perumahan dan Permukiman

1. Pembangunan perumahan dan permukiman lebih ditingkatkan dan diperluas hingga semakin merata dan menjangkau masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan senantiasa memperhatikan rencana tata ruang, keterkaitan dan keterpaduan dengan lingkungan sosial, serta kepastian hukumnya.
2. Penciptaan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni, bersih, sehat, dan aman ditingkatkan melalui pembangunan sarana dan prasarana penyediaan fasilitas kesehatan, ibadah, pendidikan, perdagangan dan transportasi, rekreasi dan olahraga, serta prasarana lingkungan termasuk penanganan limbah.

4.2.3 Bidang Pembangunan Daerah

4.2.3.1 Pembangunan Daerah

1. Memantapkan perwujudan otonomi daerah, melalui kapasitas daerah, sehingga terselenggara pemerintah dan pelayan umum yang efektif, efisien serta tumbuhnya antisipasi masyarakat.
2. Meningkatkan pengembangan potensi wilayah, melalui pengembangan ekonomi daerah, pembangunan perkotaan, pengembangan wilayah tertinggal, pinggiran kota, pengembangan permukiman, penataan ruang dan pengelolaan tanah yang baik.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kelembagaan dan organisasi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, dan peningkatan keswadayaan masyarakat.
4. Mempercepat penanganan/pembangunan daerah kumuh, dan permukiman kumuh, kawasan padat dan kurang tertib serta pinggiran kota sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan akar budaya masyarakat setempat serta mengatasi banjir.

4.2.3.2 Penataan Ruang

Guna optimalisasi tata ruang Kota Pekanbaru dikembangkan strategi pengembangan wilayah, yaitu pembangunan daerah terbelakang dan daerah pinggiran kota, pengembangan kawasan yang menunjang sektor strategis dan pengembangan kawasan yang mempunyai pertumbuhan cepat. Dalam kerangka itu perlu terus dikembangkan :

1. Meningkatkan sistem pengelolaan rencana tata ruang kota.
2. Memantapkan pengendalian pemanfaatan ruang kota
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi penataan ruang kota

4.2.3.3 Pengelolaan Pertanahan

Pengelolaan pertanahan di Kota Pekanbaru dilaksanakan melalui :

1. Peningkatan pelayanan administrasi dan sistem informasi pertanahan.

2. Peningkatan kegiatan pembangunan yang serasi dengan rencana dan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan kota.
3. Pengembangan kapasitas kelembagaan pengelolaan dan administrasi pertanahan Kota Pekanbaru.
4. Penetapan batas-batas wilayah desa, kecamatan dan kota.

4.2.3.4 Pengembangan Wilayah

Sasaran

1. Berkembangnya ekonomi wilayah yang menunjang peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, serta keterkaitan ekonomi antara pusat kota dan daerah pinggiran.
2. Meningkatkan kompetensi dan daya saing kegiatan usaha, serta produktivitas komoditas unggulan secara berkelanjutan.
3. Mempercepat kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat

Strategi Kebijakan

1. Meningkatkan aksesibilitas untuk memperlancar aliran investasi, produksi, dan pemasaran, serta keterkaitan ekonomi antar daerah yang saling menguntungkan yang didukung oleh peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan prasarana dan sarana umum.
2. Meningkatkan kompetensi dan kelangsungan kegiatan usaha yang sudah ada pada sentra-sentra produksi dan kawasan strategis lainnya, serta mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru pada wilayah yang potensial cepat tumbuh, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pengembangan jaringan kerjasama antar pelaku ekonomi berdasarkan pola kemitraan.
3. Meningkatkan kapasitas pengelolaan perkotaan dalam rangka penyediaan prasarana dan sarana termasuk hunian yang layak, aman, dan murah serta penyediaan pelayanan umum terutama pada masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, meningkatkan penanganan kerawanan sosial, meningkatkan pengelolaan ekonomi kota mendukung produktivitas,

penyediaan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, serta peningkatan daya saing dalam ekonomi global.

4. Meningkatkan kerjasama kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk pembangunan prasarana dan sarana, termasuk pengelolaan dalam pemanfaatan, pemugaran dan pelestarian kawasan strategis di perkotaan, kawasan cepat tumbuh, dan kawasan potensial.
5. Memantapkan sistem penataan ruang wilayah, kawasan perkotaan, daerah aliran sungai, kawasan kumuh, dan kawasan khusus yang dilakukan secara transparan dan partisipatif melalui pengembangan prosedur dan mekanisme, kelembagaan, pemasyarakatan, penataan ruang, perwujudan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Program Pembangunan

1. Peningkatan ekonomi wilayah, dengan melakukan pengembangan prasarana dan sarana ekonomi wilayah, pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi lokal, penyediaan input produksi, penyediaan alat bantu alih teknologi dan manajemen produksi termasuk pelayan perbankan yang menjangkau masyarakat, dan pengembangan kemitraan antar pelaku ekonomi dalam kegiatan produksi dan pemasaran.
2. Pembangunan kelurahan, dilakukan dengan pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan industri kecil dan rumah tangga, penguatan lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat, dan peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
3. Pembangunan prasarana kota, dilakukan dengan meningkatkan kemampuan pengelolaan manajemen dan pembiayaan penyediaan prasarana dan sarana termasuk pelayan umum.
4. Pembangunan perumahan dan permukiman, dilakukan dengan meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dan miskin untuk mendapatkan hunian, tersedianya sumber pembiayaan perumahan yang berasal dari akumulasi dana masyarakat, serta terpenuhinya akses masyarakat terhadap pelayanan prasarana dan sarana.
5. Penataan ruang, dilakukan dengan penyusunan rencana tata ruang wilayah dan kawasan serta menjabarkannya dalam kebijakan dan rekomendasi

pelaksanaan pemanfaatan ruang, peningkatan kemampuan pelayanan produk tata ruang kepada masyarakat luas, kerjasama antar daerah dalam kegiatan penataan ruang, pembentukan kerjasama dan konsultasi dengan lembaga dan organisasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

6. Pengelolaan pertanahan, dilakukan dengan peningkatan pelayanan administrasi dan sistem informasi pertanahan, peningkatan kegiatan penatagunaan tanah yang serasi dengan rencana dan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan, dan pengembangan kapasitas kelembagaan pengelolaan dan administrasi pertanahan.

4.2.3.5 Pemberdayaan Masyarakat

Sasaran

1. Berkembangnya lembaga dan organisasi ekonomi-sosial masyarakat yang dapat meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik.
2. Meningkatnya kondisi sosial ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat miskin dan berpotensi miskin sebagai akibat dari adanya permasalahan sosial yang dihadapinya.
3. Berkembangnya lembaga swadaya di masyarakat dalam meningkatkan solidaritas dan ketahanan sosial dalam pemecahan masalah kemasyarakatan dan bantuan kepada kelompok masyarakat miskin, dan rawan sosial.

Strategis Kebijakan

1. Melakukan penguatan lembaga dan organisasi masyarakat guna memperkuat posisi tawar dan akses masyarakat untuk memperoleh pemanfaatan input sumber daya yang dapat meningkatkan kegiatan ekonominya.
2. Mengembangkan kapasitas masyarakat melalui peningkatan keterampilan dan pengetahuan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai seperti modal, akses terhadap informasi dan teknologi sehingga dapat memperluas kesempatan berusaha, kesempatan mengembangkan inisiatif dan kreasi masyarakat.

3. Mengembangkan sistem perlindungan sosial terutama bagi kelompok masyarakat rentan dan rawan sosial.
4. Mengurangi bentuk pengaturan yang dapat menghambat masyarakat dalam pengembangan kelembagaan dan organisasi guna penyaluran pendapat, dan melakukan interaksi sosial.

Program Pembangunan

1. Penguatan lembaga dan organisasi masyarakat; dengan melakukan penghapusan peraturan yang menghambat berkembangnya lembaga dan organisasi masyarakat, penyediaan bantuan pendampingan, dan mengembangkan forum lintas pelaku.
2. Pemberdayaan masyarakat miskin; melalui penyediaan bantuan bergulir untuk kegiatan ekonomi bantuan hibah untuk pelayan sosial dasar, penyediaan bantuan prasarana dan sarana produktif, penyediaan bantuan pendampingan kepada keluarga dan kelompok masyarakat miskin dalam rangka pengembangan sistem perlindungan sosial dan kemampuan usaha serta kiat hidup produktif.
3. Peningkatan keswadayaan masyarakat; adalah dengan mengembangkan kemampuan pemerintah kota untuk membantu mengembangkan jaringan kerjasama keswadayaan, pengembangan kapasitas lembaga dan organisasi, mengembangkan kemitraan lintas pelaku, dan menghapuskan hambatan regulasi.

4.3 Analisis Wilayah Studi

Sasaran pokok dalam kebijaksanaan pembangunan adalah mewujudkan perubahan struktural dibidang ekonomis-sosiologis dalam arti transformasi dari ketimpangan menjadi keseimbangan diantara kekuatan-kekuatan golongan saudagar besar, golongan pedagang perantara, golongan produsen kecil. Kepentingan produsen kecil dan menengah itu berada di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, maupun di bidang perindustrian, pengangkutan dan perdagangan.

Tidak disangkal lagi bahwa dalam perkembangan ekonomi selama ini telah mencapai kemajuan besar di berbagai bidang. Di sisi lain ada keprihatinan bahwa dalam proses peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi, cukup banyak diantara penduduk kurang mampu memanfaatkan kesempatan dan peluang yang kini tersedia. Kesempatan lebih banyak dimanfaatkan oleh kaum saudagar dengan konglomerasinya. Hal ini cenderung lagi menambah pemusatan kekayaan dan kekuasaan ekonomi yang pada gilirannya mengganggu pembagian pendapatan secara lebih merata. Kecenderungan tersebut membahayakan kestabilan dalam suasana hidup masyarakat dan dengan sendirinya mengganggu pembangunan di bidang ekonomi.

Pembangunan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan, disamping itu juga memperhatikan pemerataan. Pembangunan juga dalam arti luas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sehingga terjadi suatu perubahan dalam pola hidup masyarakat disekitarnya. Tentu saja untuk pembangunan tersebut memerlukan investasi yang tidak sedikit, sementara daya tabung (*saving*) masyarakat masih relatif rendah. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pendapatan masyarakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer.

Sumitro (1994) mengemukakan bahwa, dimensi ekonomi regional dalam persepsi kesenjangan menunjukkan pada ketidakseimbangan dalam jalannya perekonomian antar daerah. Disini kita dihadapkan dengan suatu dilema yang dapat disebut sebagai dualisme teknologis. Secara pokok adanya dualisme teknologis menimbulkan perbedaan dan ketimpangan mengenai pola dan laju pertumbuhan diantara berbagai kawasan dalam batas wilayah ataupun secara regional.

Tanpa adanya kebijaksanaan aktif untuk menanggulangi kecenderungan itu, maka akan ada ketimpangan kumulatif pada pertumbuhan ekonomi diantara berbagai pusat kegiatan dalam wilayah.

Lebih lanjut dikatakan oleh Sumitro tentang masalah-masalah pokok dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II yakni; 1) Lapangan kerja produktif dan pengangguran, masalah ini terkait dengan ketimpangan antara produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian dan produktivitas di sektor

sekunder (industri dan konstruksi); 2) Ketimpangan pada perimbangan kekuatan diantara golongan-golongan masyarakat sebagai pelaku aktif dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa; 3) ketidakseimbangan ekonomi antar daerah.

Oleh sebab itu untuk mencapai cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur dalam GBHN disebutkan bahwa strategi pelaksanaan pembangunan harus mengacu pada tiga sasaran utama seperti yang dituangkan dalam Trilogi Pembangunan yakni: 1) Pemerataan hasil-hasil pembangunan; 2) Laju pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi; dan 3) Stabilitas nasional yang semakin mantap.

Kalau kita telaah lebih lanjut tentang sasaran pembangunan yakni pemerataan pembangunan masih merupakan tanda tanya yang patut dikaji terutama bila dikaitkan dengan aspek spasialnya. Apakah dengan semakin tumbuh dan berkembangnya investasi swasta yang ditandai dengan semakin pesatnya penanaman modal baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri akan memperkecil disparitas spasial ?

Kalau jawaban atas pertanyaan tersebut tidak, jelas yang terjadi selama ini adalah *polarization effect* yang ditandai dengan mengalirnya modal dan tenaga kerja dari daerah yang belum berkembang ke daerah yang telah berkembang dan *spread effect* serta *strickling down effect* yang diharapkan malah tidak terjadi. Akibat yang dirasakan adalah daerah yang sudah berkembang semakin berkembang dan di daerah tersebut akan terjadi penumpukan kegiatan industri, sementara daerah-daerah lain semakin tertinggal dan tidak diminati oleh investor.

Begitu juga untuk kawasan Kampung Dalam, bila diamati perkembangannya relatif lambat dibandingkan dari wilayah lain di kota Pekanbaru. Kawasan Kampung Dalam terutama di lingkungan kumuh masyarakatnya sangat marginal sekali. Apalagi daerah ini sudah terbentuk sejak dahulu, sehingga sulit merubah pola mereka, baik dari segi kehidupan sosial, maupun dari segi ekonominya. Karena kendala tersebut maka untuk menata kawasan ini akan mengalami kesulitan.

4.3.1 Gambaran Wilayah Studi

Studi pemberdayaan masyarakat ini difokuskan di Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. Dipilihnya daerah Kelurahan Kampung dalam ini sebagai pusat pengembangan pemberdayaan masyarakat didasarkan kepada beberapa hal, antara lain: 1) kepadatan penduduk yang tinggi (5.337 jiwa/Km²); 2) kualitas bangunan yang tidak memadai dan tingkat kerapatan yang tinggi (hal ini akan menimbulkan rawan bencana seperti kebakaran); 3) letak bangunan yang tidak teratur (hal ini akan rawan terhadap bencana kebakaran); 4) prasarana dan sarana lingkungan pemukiman yang tidak memadai (pendidikan, air bersih, jalan; dan sarana sosial lainnya); 5) tingkat pendapatan masyarakat yang rendah; 6) gampang mendapat bencana seperti banjir, penyakit menular, dan kurang terjaganya kesehatan lingkungan.

Ciri-ciri tersebut diatas akan menyebabkan kawasan ini identik dengan kemiskinan kota. Disamping itu juga sering digambarkan sebagai lingkungan kumuh di perkotaan. Tentu saja kawasan seperti ini harus mendapat perhatian dalam penataan kota, karena tanpa adanya pemberdayaan kawasan ini akan menimbulkan masalah baru diperkotaan. Untuk pemberdayaan lingkungan kumuh ini harus mempertimbangkan aspek fisik, sosial, dan ekonomi. Aspek fisik menyangkut dengan sarana dan prasarana baik pembangunan, perbaikan ataupun pemeliharaan/pemeliharaan. Aspek sosial berhubungan dengan rasa tanggung jawab pengelolaan lingkungan secara berkesinambungan. Sedangkan aspek ekonomi ditekankan kepada peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha rumah tangga.

4.3.2 Analisis Sosial Wilayah Studi

4.3.2.1 Kependudukan

Penduduk merupakan salah satu sumberdaya yang penting dalam pembangunan nasional karena sebagai sumber tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja dalam kualitas dan kuantitas yang memadai akan dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah. Jika diamati perkembangan penduduk di wilayah studi terlihat pada tahun 1998 jumlah penduduk di Kecamatan Senapelan sebanyak 35.386 jiwa, dan pada tahun 1999 meningkat

menjadi 36.552 jiwa dengan tingkat pertumbuhan sebesar 3,30 persen per tahun (Tabel 4.3).

Tabel 4.3 Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Senapelan Tahun 2000

Kelurahan	Keadaan Penduduk		Jumlah	Kepadatan Tiap KM ²
	Laki-laki	Perempuan		
Kampung Baru	3.318	3.242	6.560	5.513
Kampung Bandar	2.801	2.658	5.459	5.628
Padang Bulan	4.665	4.373	9.038	5.684
Padang Terubuk	3.635	3.605	7.240	4.701
Kampung Sago	1.727	1.733	3.460	5.088
Kampung Dalam	1.812	1.817	3.629	5.337
Total	17.958	17.428	35.386	5.297

Sumber: Senapelan dalam Angka, Tahun 2000

Apabila diamati dari segi kepadatan penduduk per Km per segi terlihat dari Tabel 6.1 Kelurahan Padang Bulan, Kampung Bandar, dan Kampung Baru merupakan daerah terpadat di Kecamatan Senapelan. Padatnya daerah ini disebabkan di daerah tersebut merupakan pusat permukiman yang telah lama di Pekanbaru, disamping itu juga dekat dengan pusat kota. Di daerah ini (Kampung Dalam dan Kampung Bandar) merupakan pusat kegiatan perdagangan sejak dahulu dan masih dijumpai rumah-rumah penduduk khas Melayu. Kampung Dalam dan Kampung Bandar merupakan pusat perdagangan terutama barang-barang bekas seperti, televisi, radio/tape, karpet, besi, segala macam peralatan mesin, dan lain sebagainya.

Jika diamati perkembangan penduduk di Kecamatan Senapelan selama periode 1995-1998 disajikan pada Tabel 4.4. Pada tabel tersebut terlihat tingkat pertumbuhan penduduk Kecamatan Senapelan sangat kecil sekali selama periode tersebut yaitu - 0,58 persen per tahun, atau dikatakan juga tidak terjadi penambahan penduduk selama periode tersebut. Kecilnya tingkat pertumbuhan penduduk ini kemungkinan disebabkan karena banyaknya penduduk yang migrasi ke luar daerah kecamatan, yang disebabkan kemungkinan mereka membangun rumah di daerah permukiman baru. Sebagaimana kita ketahui

Kecamatan Senapelan ini merupakan kecamatan di pusat kota. Kegiatan mereka pada umumnya adalah berorientasi bisnis. Begitu juga dengan perkembangan penduduk di wilayah studi terlihat cenderung turun.

Tabel 4.4 Perkembangan Penduduk di Wilayah Studi Tahun 1995 – 1998

Tahun	Penduduk						Penduduk Kecamatan n
	Kampung Dalam		Kampung Bandar		Kampung Baru		
	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	
1995	3.824 (5.623)	795	5.601 (5.774)	1.120	6.733 (5.658)	1.347	36.006 (5.415)
1996	3.749 (5.513)	761	5.448 (5.658)	995	6.728 (5.654)	1.281	35.923 (5.402)
1997	3.665 (5.390)	733	5.448 (5.616)	1.090	6.639 (5.579)	1.328	35.723 (5.372)
1998	3.629 (5.297)	762	5.459 (5.628)	990	6.560 (5.513)	1.549	35.386 (5.297)
Pertumbuhan	-1,73		-0,85		-0,86		-0,58

Sumber : BPS, Senapelan Dalam Angka Beberapa Tahun
Angka dalam kurung menunjukkan kepadatan penduduk per Km².

Selain kuantitas, peranan penduduk dalam pembangunan daerah sangat ditentukan juga oleh kualitasnya. Semakin tinggi kualitas penduduk semakin besar pula peranannya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Salah satu indikator kualitas penduduk adalah tingkat pendidikan. Pendidikan dapat meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan yang tepat terhadap berbagai alternatif, kemampuan berpikir dan mengadopsi teknologi. Pada umumnya penduduk dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi menjadi responsif, inovatif dan adoptif terhadap perubahan teknologi baru dibanding penduduk berpendidikan rendah.

Pertumbuhan tingkat pendapatan dan penambahan penduduk yang pesat menuntut kebutuhan hidup yang semakin kompleks. Kebutuhan tidak saja terbatas pada pangan tetapi juga sandang, perumahan dan kebutuhan lainnya. Di sisi lain, ketersediaan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan tersebut semakin terbatas jumlah dan mutunya. Ketersediaan sumberdaya lahan pertanian misalnya, semakin lama lahan yang dimiliki menyempit

disebabkan perkembangan sektor pertanian, industri dan jasa (pariwisata) yang juga membutuhkan lahan yang luas.

Perkembangan teknologi produksi dan pertumbuhan tingkat pendapatan telah menyebabkan terjadinya perubahan struktur ekonomi Wilayah Studi selama dua dasawarsa terakhir ini. Peranan sektor pertanian secara relatif semakin menurun karena digeser oleh sektor industri dan jasa. Struktur produksi dan tenaga kerja juga mengalami perubahan sejalan dengan terjadinya pergeseran peranan berbagai ekonomi. Kebutuhan tenaga kerja mengalami pergeseran dari tenaga kerja tidak terampil ke tenaga kerja terampil.

Mengacu pada pendapat Soekirno (1989) tentang kriteria umur produktif yang berkisar antara 15-55 tahun, maka sampel yang diamati tergolong usia produktif atau relatif muda dengan rata-rata umur 45,9 tahun, seperti yang disajikan pada Tabel 4.5 Sampel yang berusia di bawah 40 tahun sekitar 41,8 persen. Sedangkan usia antara 40 – 55 tahun sekitar 31,34 persen. Relatif mudanya umur sampel di Kelurahan Kampung Dalam akan membuka peluang usaha untuk meningkatkan ekonomi keluarga mereka.

Tabel 4.5 Kelompok Umur Sampel. Tahun 2000

No	Kelompok Umur	Frekuensi	Persentase
1.	26 – 30	3	4,48
2.	31 – 35	10	14,93
3.	36 – 40	15	22,39
4.	41 – 45	5	7,46
5.	46 – 50	9	13,43
6.	51 – 55	7	10,45
7.	56 – 60	9	13,43
8.	61 – 65	4	5,97
9.	> 65	5	7,46
Jumlah		67	100
Rata-rata umur sampel 45,9 tahun			

Dari data yang diperoleh di lapangan menunjukkan jumlah tanggungan kepala keluarga sedang, hal ini dapat diamati pada Tabel 4.6. Dari tabel

tersebut terlihat kepala keluarga yang mempunyai tanggungan lebih dari 3 orang sebesar 40,3 persen, sementara yang mempunyai tanggungan ≤ 3 orang sebanyak 59,7 persen. Dari sampel diperoleh tanggungan rata-rata dari kepala keluarga sebanyak 4 orang. Besarnya jumlah tanggungan kepala keluarga di daerah ini akan menyebabkan beban hidup yang ditanggung oleh anggota keluarga menjadi besar, dan beban ketergantungan juga tinggi. Pada umumnya mereka yang mempunyai jumlah tanggungan yang besar itu bukan penduduk asli, melainkan penduduk pendatang. Tingginya jumlah tanggungan kepala keluarga bukan disebabkan karena mereka mempunyai anak yang banyak, tetapi pada umumnya mereka membawa anggota keluarga yang berasal dari kampung halaman mereka seperti mertua, adik, adik ipar, keponakan. Hal ini juga akan menyebabkan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk di daerah studi.

Tabel 4.6 Jumlah Tanggungan Keluarga Sampel

No	Jumlah Tanggungan	Frekuensi	Persentase
1.	1	8	11,94
2.	2	8	11,94
3.	3	24	35,82
4.	4	17	25,38
5.	5	5	7,46
6.	6	5	7,46
Jumlah		67	100
Rata-rata tanggungan keluarga 4 orang			

4.3.2.2 Pendidikan

Dari hasil lapangan khususnya daerah kelurahan Kampung Dalam, ditinjau dari aspek indentitas sampel, khususnya pendidikan, dapat diungkapkan bahwa kualitas sumberdaya manusia masih rendah. Berikut ini disajikan pada Tabel 4.7 tentang tingkat pendidikan.

Tabel 4.7 Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Pendidikan Tertinggi Sampel			
		Orang Tua		Anak	
		Frekuensi	%	Frekuensi	%
1	Tidak Sekolah	5	7,46	0	0
2	Sekolah Dasar	27	40,30	9	13,43
3	Sekolah Lanjutan Pertama	9	13,42	17	25,37
4	Sekolah Lanjutan Atas	13	19,41	24	35,83
5	Perguruan Tinggi	13	19,41	17	25,37
Jumlah		67	100	67	100
Rataan lama pendidikan sampel 8,86 tahun (SLTP)					

Rataan lama pendidikan sampel 8,86 tahun atau sebagian sampel berpendidikan sederajat SLTP. Sesuai dengan tuntutan pekerjaan, maka tingkat pendidikan SLTA dan perguruan tertinggi sampel (38,82 persen) sebagian besar bekerja di sektor jasa dan industri, sedangkan yang berpendidikan sederajat SLTP ditemukan bekerja disektor perdagangan, sementara sampel yang berpendidikan sekolah dasar pada umumnya bekerja disektor industri dan jasa kalangan bawah (buruh industri atau pelabuhan).

Hal ini memberikan indikasi bahwa sektor industri membutuhkan kecakapan dan keterampilan yang lebih tinggi. Pada umumnya keterampilan lebih mudah ditingkatkan apabila pendidikan pekerja tersebut semakin tinggi. Pentingnya pendidikan tersebut bagi perusahaan supaya tenaga kerja dapat dengan mudah meningkatkan keterampilannya dan mengarah kepada spesialisasi kerja, sehingga nanti akan dapat meningkatkan produktivitas baik tenaga kerja maupun perusahaan.

Dari sisi lain sampel yang berpendidikan rendah sebesar 61,18 persen (SD dan SLTP) pada umumnya masyarakat tempatan (asli), sedangkan sampel yang berpendidikan lebih lanjut pada umumnya pendatang yang mencari pekerjaan atau membuka usaha disekitar daerah tersebut..

Kalau diperhatikan pendidikan anak dari sampel pada umumnya anak mereka masih dalam sekolah. Ada 25,87 persen anak mereka yang menempuh

pendidikan tinggi, SLTA dan SLTP sebanyak 61,2 persen, sekolah dasar 13,43 persen. Dari hasil pengamatan di lapangan pendidikan anak dibandingkan pendidikan orang tua jauh lebih tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan sampel pada umumnya mereka menginginkan anaknya berpendidikan supaya kelak kehidupan anaknya jauh lebih baik dari orang tua.

Semua sampel menyatakan keinginan untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun demikian, ditemukan sebagian masyarakat kelihatan pesimis untuk mampu mewujudkan harapan untuk melanjutkan pendidikan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan keadaan perekonomian yang tidak menentu dan perolehan pendapatan yang rendah.

4.3.2.3 Perumahan

Kualitas Bangunan

Dari Tabel. 4.8 dapat dilihat kondisi rumah masyarakat (sampel) di Kelurahan Kampung Dalam, yakni 34,33 persen yang rumahnya masih non permanen, masyarakat ini mata pencarian utamanya adalah berdagang.

Mereka ini tinggal di pinggiran sungai Siak. Rumah yang sudah permanen dan semi permanen masing-masing sebanyak 10,45 dan 55,22 persen. Mereka yang rumahnya permanen pada umumnya adalah mereka yang bekerja disektor jasa dan pengusaha/pedagang besar, kehidupannya jauh lebih baik, sementara mereka yang rumahnya semipermanen adalah sebagian besar mereka bekerja disektor informal. Kebanyakan rumah masyarakat di kelurahan Kampung Dalam ber dinding kayu dan berlantai kayu. Rumah ini banyak ditemukan di bagian pelosok (belakang toko bertingkat) dan sebagian besar ke arah Sungai Siak. Rumah kayu/semi permanen tersebut sebagian besar lingkungannya jorok. Penyebabnya antara lain tidak lancarnya aliran air pada Sungai Sago, terutama pada musim hujan.

Pada muara Sungai Sago dengan Sungai Siak dibuat alat pengendali banjir, namun sayangnya alat tersebut tidak berfungsi. Pada saat air pasang katup penutup tidak berfungsi, sehingga air pasang masuk ke Sungai Sago. Begitu juga pada musim hujan, alat tersebut seharusnya dapat menyedot air

untuk mempercepat pengaliran malah sebaliknya, air dari sungai masuk ke daerah tersebut. Ini disebabkan karena katup penutup tidak berfungsi. Dari sisi lain Sungai Sago ini juga telah terjadi pendangkalan karena banyaknya sampah yang terbawa arus dari pasar pusat. Pada saat hujan atau pasang Sungai ini cepat sekali penuh, sehingga daerah sekitarnya sering banjir.

Tabel 4.8 Keadaan Rumah yang Dimiliki Keluarga Sampel

No	Kondisi	Frekuensi	Perentase
1	Jenis Rumah		
	• Permanen	7	10,45
	• Semi Permanen	37	55,22
	• Non Permanen	23	34,33
	Jumlah	67	100
2	Atap		
	• Rumbia	3	4,48
	• Seng	58	86,57
	• Genteng	6	8,96
	• Asbes	0	0
Jumlah	67	100	
3	Dinding		
	• Bambu	0	0
	• Kayu	48	71,64
	• Bata	19	28,36
Jumlah	67	100	
4	Lantai		
	• Tanah	0	0
	• Semen	42	62,69
	• Keramik	3	4,48
	• Kayu	22	32,83
Jumlah	67	100	
5	Sumber Air		
	• Sungai	0	0
	• Sumur	39	58,21
	• PAM	28	41,79
Jumlah	67	100	

Sumber : Data Olahan

Apabila diamati sumber air bersih, terlihat sebanyak 56,21 persen mereka menggunakan air sumur, sisanya menggunakan air PAM. Air sumur yang digunakan oleh masyarakat kelurahan Kampung Dalam berasal dari sumur bor yang berjumlah 5 buah. Rata-rata satu sumur bor menggunakan

sekitar 80-100 KK. Berdasarkan informasi dari masyarakat sumur ini masih terasa kurang. Untuk itu perlu perhatian dari pihak yang terkait untuk menambah kapasitas sumur untuk masyarakat Kampung dalam.

Kerapatan Bangunan

Pengamatan secara visual di lapangan bahwa kerapatan bangunan yang ada di Kampung Dalam sangat padat karena ruang antar bangunan sudah sangat sempit. Demikian juga jalan – jalan yang ada didalam kawasan sebagian besar berupa jalan setapak dengan lebar paling besar 1,5 meter. Dengan kerapatan bangunan tersebut maka pencahayaan dan penghawaan ke dalam masing-masing bangunan sangat kurang sehingga berpengaruh pada kesehatan dan memberi kesan sangat sumpek. Berbagai kerawanan sangat mungkin terjadi yaitu bahaya kebakaran dan wabah penyakit. Dari aspek sosial, tidak terdapatnya ruang terbuka yang memadai untuk kontak sosial dan ruang bermain anak-anak, sehingga gang-gang sempit akan menjadi satu-satunya alternatif tempat bermain anak-anak.

4.3.2.4 Kelembagaan

Perkembangan suatu daerah ditandai dengan perubahan struktur ekonomi yang ditandai dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Di samping itu, terjadi perubahan sosial kemasyarakatan yang ditandai dengan munculnya berbagai macam lembaga yang sebelumnya tidak ada ataupun kalau ada biasanya kurang berperan sebagaimana mestinya. Berbagai macam lembaga yang muncul di wilayah-wilayah studi adalah lembaga-lembaga yang berhubungan erat dengan kebutuhan ekonomi antara lain Bank, KUD, pasar, dan sebagainya. Di samping itu, pada daerah penelitian juga telah terbentuk lembaga-lembaga yang biasanya ada pada masing-masing wilayah kelurahan antara lain LKMD, PKK, dan Posyandu.

Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat menuntut berdirinya kelembagaan yang menangani kebutuhan suatu kelompok masyarakat maupun kebutuhan masyarakat yang berada pada suatu wilayah. Pada daerah penelitian telah ditemukan lembaga koperasi yang melayani masyarakat dalam hal keuangan berupa simpan pinjam. Dengan semakin meningkatnya

pendapatan masyarakat baik yang terlibat langsung maupun tak langsung dalam kegiatan usaha menyebabkan terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan lembaga perbankan. Masyarakat dapat menyimpan uangnya dengan rasa aman sebagai tabungan masa depan.

Peluang kerja dan usaha yang semakin meluas dengan adanya pengembangan daerah juga merupakan penyebab pentingnya keberadaan Bank, sehingga para pengusaha ataupun masyarakat secara umum dapat mencari alternatif sumber modal untuk mengelola usahanya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut telah berdiri berbagai macam bank baik bank pemerintah maupun bank swasta di sekitar wilayah studi diantaranya Bank BRI, Bukopin dan Bank Muamalat.

Koperasi merupakan salah satu lembaga ekonomi di tingkat bawah, keberadaannya semakin diperlukan masyarakat. Hal ini ditemukan pada daerah penelitian, khususnya di Kelurahan Kampung Dalam dan Kampung Baru. Cuma bentuk usahanya masih simpan pinjam. Koperasi inipun modalnya terbatas. Kurang berkembangnya koperasi di daerah ini disebabkan karena rendahnya partisipasi anggota. Disamping itu juga disebabkan kurangnya kreatif pengurus untuk mencari bentuk usaha koperasi yang menguntungkan. Penyebab ini adalah kurangnya partisipasi anggota.

Untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari dapat dipenuhi melalui pasar yang terdapat di kelurahan kampung dalam. Pasar tersebut disamping menjual kebutuhan sehari-hari juga menyediakan kebutuhan sekunder.

Lembaga non ekonomi juga tumbuh dan berkembang baik lembaga formal seperti LKMD, LMD, Karang Taruna, PKK dan Posyandu dan lembaga nonformal seperti tempat-tempat hiburan. Kelembagaan tersebut diperlukan sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat, lintas informasi, pelayanan kesehatan dan menenangkan pikiran. Lembaga desa seperti LKMD, LMD dan Karang Taruna, sangat diperlukan sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat dan meningkatkan ketahanan masyarakat yang dapat mewujudkan ketahanan dan keamanan. Peran aktif masyarakat dalam lembaga tersebut sangat diperlukan, karena dengan berkembangnya suatu daerah menyebabkan terjadi

penggabungan pola kehidupan masyarakat yang heterogen berasal dari berbagai daerah yang berbeda pola hidup dan prilakunya. Sedangkan PKK diperlukan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan kaum ibu seiring dengan perkembangan jaman.

Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya bagi mereka yang tidak mampu ekonominya, telah didirikan sebuah sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) dengan swadaya masyarakat. Kendala yang dihadapi oleh pengurus sekolah tersebut adalah :

1. masalah dana untuk biaya operasional sekolah.
2. masalah gedung yang letak dan bangunan yang tidak memadai sebagai lembaga pendidikan.
3. banjir karena lokasinya termasuk rendah, disamping itu penyebab banjir adalah tidak berfungsinya alat pengendali banjir di muara sungai Sago, sehingga kalau terjadi hujan lebat secara otomatis kegiatan sekolah terhenti karena banjir.

Dari pengamatan dilapangan dan berbincang-bincang dengan pemuka masyarakat, ada dua lokal sekolah MIS yang tidak dapat berfungsi karena selalu banjir dan tata ruangnya yang tidak bagus (pada musim hujan tinggi air dalam kelas mencapai sekitar 70 cm). Untuk itu diperlukan bantuan dari pihak lain untuk merenovasi gedung tersebut dan membangun jalan dari jalan M. Yatim ke sekolah MIS.

4.3.2.5 Sarana, Prasarana dan Lingkungan

Lingkungan sebagai tempat hidup manusia secara tidak langsung menunjang kesejahteraan manusia yang hidup di lingkungan itu. Lingkungan ini mencakup:

a. Jalan Lingkungan & Jalan Setapak

Secara umum jalan lingkungan dan jalan setapak sudah di cor beton. Namun seiring dengan perkembangan penduduk yang berimplikasi ke mobilitas penduduk, jalan sering menjadi kendala yaitu dimensi lebarnya yang sangat kecil dengan pola yang tidak teratur. Kondisi ini menyebabkan aksesibilitas

kedalam kawasan terganggu dan menimbulkan kerawanan dalam keadaan darurat seperti kebakaran.

b. Jembatan

Jembatan merupakan penghubung jalan satu dengan jalan lainnya yang terputus oleh sungai atau kendala lainnya. Fungsi dari jembatan ini sangat vital untuk kelancaran mobilitas penduduk. Di Kampung Dalam terdapat 3 buah jembatan yang permanen, namun berdasarkan pengamatan visual langsung di lapangan terdapat satu jembatan perlu di perlebar dalam rangka memperlancar aksesibilitas warga ke daerah sentra perdagangan, implikasinya akan menumbuhkan sumber perekonomian dan akhirnya akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung Dalam.

c. Saluran drainase

Saluran yang ada di lingkungan Kampung Dalam masih kurang memenuhi kriteria yang standar untuk kawasan permukiman, sebagai akibat tata letak bangunan yang tidak teratur, serta perawatan drainase yang ada kurang diperhatikan. Disamping itu kondisi letak lokasi yang datar sehingga terpengaruh oleh genangan sungai siak. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau kawasan ini sering banjir apabila musim penghujan.

d. Sarana Sanitasi

Sanitasi di lingkungan kampung dalam masih sangat buruk. Dari hasil pengamatan visual di lapangan, limbah rumah tangga berserak di sekeliling tempat tinggal mereka bahkan disepanjang jalan, gang dan di sungai yang menyebabkan pada waktu musim penghujan terjadi penyumbatan dan banjir.

e. Sarana Persampahan

Sarana persampahan di setiap lingkungan di perkotaan menjadi masalah yang besar, karena setiap individu, keluarga ataupun kelompok masyarakat akan mengeluarkan limbah berupa sampah. Di Kampung Dalam penanganan sampah ini masih sangat buruk yang ditunjukkan dengan sarana sampah yang ada tidak memadai dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada.

4.3.3 Kondisi Ekonomi Wilayah Studi

4.3.3.1 Peluang Kerja dan Usaha

Salah satu dampak dari pembangunan adalah timbulnya peluang kerja dan usaha di daerah sekitarnya. Besarnya dampak ini antara lain akan tergantung kepada jenis usaha dan produk yang dihasilkan, ada tidaknya linkages (kaitan) besarnya investasi yang ditanamkan dan kondisi lokal tempat dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Tidak kalah pentingnya adalah kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan upaya mengoptimalkan dampak pembangunan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut sampel dari hasil wawancara dapat diungkapkan bahwa secara umum pembangunan yang ada telah memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat sekitarnya. Dari Tabel 4.9 ditemukan sebanyak 20,9 persen sampel mengatakan generasi sekarang tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, sebanyak 17,91 persen mengatakan sangat sulit mendapatkan pekerjaan. Pada umumnya mereka yang terakhir ini adalah yang baru tamat sekolah dan belum mendapatkan pekerjaan.

Tabel 4.9 Tingkat Kesulitan Generasi Saat Ini Mendapatkan Pekerjaan

No	Tingkat Kesulitan	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat sulit	12	17,91
2.	Sulit	32	47,76
3.	Agak sulit	14	20,90
4.	Mudah	9	13,43
Jumlah		67	100

Sumber : Data olahan

Sampel yang menyatakan mudah untuk mendapat pekerjaan sebesar 13,43 persen. Masyarakat ini dapat melihat peluang-peluang untuk memperoleh pekerjaan disebabkan telah mempunyai pengalaman dan keterampilan pada bidang yang dilakukannya. Kelompok masyarakat ini telah mampu

menganalisis bidang usaha yang akan ditekuni sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

Berbagai ragam pendapat sampel tentang tingkat kesulitan dalam pengembangan usaha, tergantung pada latar belakang ilmu pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja, disajikan pada Tabel 4.10. Dari tabel ini terlihat bahwa lebih dari 41 persen sampel menjawab sulit untuk berkembang, lebih dari 17 persen menyatakan sangat sulit, dan 13,43 persen yang menganggap mudah untuk mengembangkan usaha. Sulitnya mereka mengembangkan usaha disebabkan kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya. Sebagian besar usaha masyarakat di daerah studi adalah menjual barang-barang bekas yang datang dari luar negeri, antara lain; elektronik, karpet. Karena barangnya datang dari luar negeri, tentu saja harganya sangatlah berfluktuasi sesuai dengan perkembangan nilai mata uang rupiah terhadap dolar Singapura. Disamping masalah modal juga mengenai lokasi berjualan kurang mendukung. Pada umumnya masyarakat tersebut menjual barang dagangannya di depan rumahnya.

Tabel 4.10 Tingkat Kesulitan Pengembangan Usaha Saat Ini

No	Tingkat Kesulitan	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat sulit	12	17,91
2.	Sulit	28	41,79
3.	Agak sulit	18	26,87
4.	Mudah	9	13,43
Jumlah		67	100

Sumber : Data olahan

Daerah Kampung dalam dan kampung Bandar selama ini terkenal menjual barang-barang bekas dari luar, terutama barang elektronik. Sedangkan untuk daerah Kampung Bandar pada umumnya menjual alat-alat mesin dan barang-barang kebutuhan angkutan. Untuk mendukung usaha ini perlu suatu kebijaksanaan pemerintah melakukan penataan tempat penjualan.

Karena daerah ini sudah spesifik terhadap perdagangan barang bekas ini, maka perlu dikembangkan menjadi suatu lokasi khusus.

Untuk itu perlu ditata lokasi penjualannya. Salah satu alternatif pemecahannya adalah dibukanya jalan yang menghubungkan jalan M. Yatim dengan jalan Kampung Dalam I. Jalan ini terputus karena adanya pembangunan gudang pelabuhan oleh perum Pelabuhan. Dengan pembangunan gudang ini terjadi penyempitan jalan dari semula 6 meter menjadi 1,5 meter. Apabila jalan ini dibangun akan membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitarnya. Apalagi jika dijadikan jalan satu arah dari jalan Saleh Abbas menuju jalan Sudirman melalui jalan Kampung Dalam I. Hal ini juga akan mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan Ir. H. Juanda (Lihat peta pada lampiran).

4.3.3.2 Distribusi Pendapatan

Salah satu tolok ukur keberhasilan suatu pembangunan adalah peningkatan dan pemerataan pendapatan. Pengertian pemerataan pendapatan masih belum diberikan secara jelas, karena para ahli ekonomi umumnya hanya memperhatikan jumlah pendapatan itu sendiri tanpa memperhatikan dari manakah asalnya pendapatan itu. Sekelompok masyarakat dapat saja memperoleh jumlah pendapatan yang sama, namun pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan tersebut belum tentu akan sama besarnya. Karena itu para ahli ekonomi dalam merencanakan pemerataan ini umumnya lebih berorientasi pada peningkatan pendapatan individual, kemudian mengelompokkannya pada suatu ukuran tertentu. Kelompok-kelompok berdasarkan pendapatan tersebut kemudian diukur dan dianalisis. Dari hasil yang diperoleh kemudian disusun perencanaan untuk menentukan langkah-langkah kebijaksanaan yang dapat diambil.

Untuk memperoleh gambaran sampai sejauh mana pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, perlu pula dikaji distribusi pendapatan yang diterima masyarakat. Distribusi pendapatan ini diukur melalui sampel yang diperoleh di lapangan. Untuk itu disusun kelompok masyarakat berdasarkan persentase pendapatannya dalam suatu tabel persentase pendapatan menurut

beberapa kategori dari semua sampel. Hasil yang diperoleh kemudian diukur berdasarkan urutan menurut kriteria penilaian sebagai tercantum pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Ratio Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Kriteria Penilaian		Tingkat Ketimpangan
Gini Ratio	Bank Dunia	
< 0,30	> 17 %	Rendah
0,30 – 0,40	12 – 17 %	Sedang
> 0,40	< 12 %	Tinggi

Sumber : Suseno Triyanto W, Indikator Ekonomi.

*) Untuk 40 persen penduduk berpendapatan terendah.

Selanjutnya pada Tabel 4.12 terlihat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di daerah studi, dimana 40 persen masyarakat berpendapatan terendah memperoleh hanya 16,87 persen dari total pendapatan, sementara 20 persen masyarakat berpenghasilan tertinggi menikmati 44,74 persen dari total pendapatan. Apabila dikaitkan dengan kriteria ketimpangan dari Bank Dunia maka ketimpangan pendapatan di daerah studi (Kampung Dalam) termasuk sedang.

Dari Tabel 4.12 dapat dilihat perbandingan antara pendapatan masyarakat tertinggi dengan pendapatan masyarakat terendah sebesar 2,62, artinya 20 persen kelompok masyarakat berpendapatan tinggi adalah 2,62 kali lipat dari pendapatan 40 persen masyarakat kelompok berpendapatan rendah. Relatif tingginya ketimpangan distribusi pendapatan pada masyarakat sampel ini disebabkan pada lokasi penelitian merupakan daerah perdagangan, sementara mereka yang tidak terlibat di sektor perdagangan mempunyai penghasilan yang relatif lebih rendah. Pada umumnya masyarakat yang berpenghasilan rendah tersebut adalah mereka yang bekerja disektor jasa terutama buruh harian dan perdagangan sektor informal. Sehingga di dalam masyarakat pendapatannya sangat bervariasi.

Tabel 4.12 Persentase Penduduk Menurut Persentase Pendapatan Masyarakat (sampel) di Riau

Kelompok Pendapatan Masyarakat	Persentase dari Total Pendapatan	Perbandingan Pendapatan
40 % pendapatan terendah	16,87	2,62
40 % pendapatan sedang	38,96	
20 % pendapatan tertinggi	44,74	
Jumlah	100	
Gini Ratio		0,36866

Sumber : Data Olahan

Bervariasinya pendapatan masyarakat di daerah studi, terutama antara masyarakat asli dengan pendatang. Masyarakat asli pada umumnya usahanya sulit untuk berkembang, sedangkan masyarakat pendatang usahanya relatif berkembang. Dari sisi lain kemungkinan disebabkan beberapa hal antara lain:

1. Beberapa sektor seperti perdagangan memberikan nilai tambah yang tinggi sehingga sektor ini juga akan memberikan balas jasa yang tinggi pada masyarakat yang terlibat di dalamnya. Sedangkan masyarakat yang tidak terlibat dengan perdagangan masih menerima pendapatan yang relatif lebih rendah.
2. Masyarakat yang berada di sekitar pasar bawah (terutama pusat pertumbuhan) dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha sampingan seperti, warung, berdagang, transportasi, jasa, sehingga kegiatan sampingan ini juga dapat meningkatkan pendapatan keluarga.
3. Masih adanya budaya dalam masyarakat menerima apa adanya, tidak ada inisiatif untuk mengembangkan usaha lain, produktivitas masih rendah, dan masih mengandalkan hasil yang diperoleh dari pekerjaan tetap.

Pada Tabel 4.13 disajikan pendapatan masyarakat di wilayah studi (Kelurahan Kampung Dalam). Rata-rata pendapatan mereka sebesar Rp 763.029,- per bulan. Dari tabel tersebut masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.000.000 per tahun atau dibawah Rp 600.000,- per bulan sebanyak 52,24 persen. Masyarakat ini pada umumnya bekerja di sektor jasa (pegawai negeri atau buruh harian). Masyarakat yang berpendapatan antara Rp

700.000 – Rp 1.200.000 sekitar 37,32 persen, pada umumnya mereka berusaha berdagang barang bekas (elektronik, karpet, alat-alat mobil, dan lain sebagainya), sedangkan yang berpendapatan di atas Rp 1.200.000 adalah mereka yang mempunyai modal kerja, antara lain sudah mempunyai rumah toko (ruko), dagangannya sudah skala besar.

Tabel 4.13 Kelompok Pendapatan per Tahun Masyarakat Sampel

No	Kelompok Pendapatan (Rp)	Frekuensi	Persentase
1.	3.072.000 – 7.257.600	35	52,24
2.	7.257.601 – 11.443.200	15	22,39
3.	11.443.201 – 15.628.800	10	14,93
4.	15.628.801 – 19.814.400	6	8,96
5.	> 19.814.400	1	1,48
Jumlah		67	100
Rata-rata pendapatan sampel Rp 763.029,- per bulan			

Sumber : Data olahan

Penyebab lain rendahnya pendapatan mereka kemungkinan disebabkan oleh faktor pendidikan dan keterampilan serta faktor sosial budaya masyarakat yang belum siap menerima budaya industri modern, sehingga terjadi alienasi masyarakat dari lembaga ekonomi modern. Pengamatan di lapangan terlihat bahwa mayoritas masyarakat yang berpenghasilan rendah adalah masyarakat lokal sedangkan masyarakat sebagai pendatang relatif lebih bisa memanfaatkan peluang yang ada.

Suatu peluang usaha akan menjadi sumber pendapatan yang memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat jika mampu menangkap peluang usaha yang potensial dikembangkan menjadi suatu kegiatan usaha yang nyata. Kemampuan masyarakat memanfaatkan peluang yang ada akan dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam menangkap peluang itu sendiri. Yang kedua adalah kemampuan mengorganisir sumberdaya yang dimiliki sedemikian rupa sehingga peluang yang potensial menjadi usaha yang secara aktual dapat dioperasionalkan.